

HUBUNGAN ARAB SAUDI DAN MESIR PADA MASA PEMERINTAHAN ABDEL FATTAH AL-SISI DALAM KONFLIK SURIAH

Oleh : Muhammad Farhan Surez

(muhammad.farhan4236@student.unri.ac.id)

Dr. Mhd. Saeri, M. Hum

(m.saeri@lecturer.unri.ac.id)

Bibliografi: 10 Situs dan Dokumen Resmi, 8 Jurnal dan Laporan Penelitian, 1 Buku

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau Kampus Bina Widya, Jl. HR Soebrantas Km 12,5

Simp. Baru Pekanbaru 28293

Abstract

This study aims to examine the relationship between two mutually influential countries in the Middle East region, namely Saudi Arabia and Egypt. Relations between the two countries have experienced various dynamics, either as rivals or allies. Relations between Saudi Arabia and Egypt, which had deteriorated after the fall of the Hosni Mubarak regime caused by the Arab Spring, recovered after the rise of Abdel Fattah Al-Sisi to the reins of Egyptian power after the coup of Muhammad Morsi's government, which incidentally is a figure affiliated with the Muslim Brotherhood (MB). Saudi Arabia played an important role in the coup carried out by Al-Sisi, but the relations between the two countries became heated again after the differences in interests in the Syrian conflict.

The results of this study indicate that the Syrian conflict has created new dynamics for the relationship between Saudi Arabia and Egypt. The occurrence of differences in interests in responding to the Syrian conflict has caused heated relations between Saudi Arabia and Egypt as evidenced by the negative response given by Saudi Arabia to Egypt's support for the Bashar Al-Assad regime in Syria. Saudi Arabia wants the fall of the Assad regime in Syria due to rival interests for regional dominance with Iran as well as Sunni and Shia ideological rivalries with Iran. While on the other hand, Egypt wants the Assad regime in Syria to remain stable so that Al-Sisi's power in Egypt is not threatened by the influence of Islamist and extremist groups such as MB.

Keywords: Saudi Arabia and Egypt Relation, Middle East, Syrian Conflict, Regional Domination, Sunni, Shia

Pendahuluan

Sejarah singkat hubungan luar negeri antara Mesir dan Arab Saudi dapat diteliti kembali pada era modern Timur Tengah seperti saat sekarang ini. Hubungan antara kedua negara ini telah mengalami berbagai dinamika, baik menjadi sekutu maupun lawan. Periodisasi dinamika hubungan antara Mesir dan Arab Saudi saat menjadi lawan dapat ditemukan pada era pemerintahan presiden Gamal Abdel Nasser (1956-1970), era presiden Anwar Sadat (1970-1981), kemudian pada era presiden Mohammad Mursi (2012-2013). Sedangkan periodisasi dinamika hubungan antara Mesir dan Arab Saudi saat menjadi sekutu dapat ditemukan pada era pemerintahan presiden Hosni Mubarak (1981-2011) dan pada era presiden Abdel Fattah Al-Sisi (2014-sekarang).

Tulisan ini akan memfokuskan pada pembahasan hubungan antara Arab Saudi dan Mesir pada era pemerintahan presiden Abdel Fattah Al-Sisi. Pada periode ini, Arab Saudi dan Mesir merupakan sekutu, namun terjadi ketegangan hubungan antara keduanya dikarenakan perbedaan kebijakan politik dan kepentingan dalam Konflik Suriah. Mesir di bawah rezim Al-Sisi, faktanya tidak terlepas dari peran vital dari dukungan Arab Saudi berupa bantuan finansial sejak awal berkuasa hingga saat ini. Dengan adanya fakta tersebut, maka perlu dibahas tentang mengapa fenomena tersebut bisa terjadi, serta bagaimana dampaknya terhadap dinamika hubungan antara Arab Saudi dan Mesir.

Pengembangan dari tulisan ini menyesuaikan dengan ide-ide yang telah dijelaskan di alinea sebelumnya. Dengan demikian, pengembangan tersebut meliputi: (A) Konflik Suriah serta posisi Arab Saudi dan Mesir; (B) kepentingan Arab Saudi dalam Konflik Suriah; (C) respon negatif Arab Saudi terhadap perbedaan kebijakan politik dalam Konflik Suriah.

A. Konflik Suriah serta posisi Arab Saudi dan Mesir

1. Sejarah Konflik Suriah

Konflik Suriah atau yang juga dikenal sebagai Perang Sipil Suriah merupakan eskalasi dari suatu fenomena yang dikenal sebagai Arab Spring. Arab Spring merupakan sebuah gelombang yang memiliki tujuan untuk terciptanya proses demokratisasi sistem pemerintahan terhadap rezim-rezim otoriter yang telah lama berkuasa di dunia Arab, yang dimulai pertama kali di Tunisia pada tahun 2010. Gelombang Arab Spring kemudian turut menjalar ke berbagai negara di dunia Arab, termasuk salah satunya adalah Suriah.¹

Suriah sejak tahun 1971 dipimpin oleh rezim keluarga Assad yakni Hafez Assad (ayah dari Bashar Assad) dengan gaya pemerintahan terpusat dan otoritarian. Setelah Hafez mangkat, ia digantikan oleh Bashar Assad pada tahun 2000. Rakyat Suriah sempat memiliki sedikit harapan terhadap Bashar Assad yang direpresentasikan sebagai seorang reformis dan modernis. Akan tetapi harapan akan perubahan di bawah kepemimpinan Bashar Assad tidak pernah

¹ Hafeez Ullah Khan dan Waseem Khan, 2017, *Syria: History, The Civil War and Peace Prospects*, Journal of Political Studies, Vol 24 No. 2, hal. 591

terwujud. Hak kebebasan berpolitik yang diharapkan oleh rakyat Suriah tidak pernah terjadi di bawah pemerintahan rezim Bashar Assad. Ia dengan segera menghapus hak berpolitik tersebut. Bahkan lebih lanjut, Bashar Assad justru menghidupkan kembali tata pemerintahan otoritarian seperti mendiang ayahnya. Hal ini ia buktikan dengan memberlakukan sensor dan pengawasan yang luas, serta memberlakukan tindakan yang brutal terhadap pihak-pihak yang dicurigai sebagai penentang rezim. Beberapa organisasi hak asasi kemanusiaan bahkan menuding bahwa selama periode kekuasaannya, Assad seringkali melakukan penyiksaan serta membunuh lawan politiknya.²

Dalam bidang ekonomi, Assad memberlakukan pengawasan terhadap liberalisasi ekonomi yang signifikan yang didominasi oleh negara Suriah. Akan tetapi, hal tersebut hanya semakin memperkaya jaringan kroni kapitalis yang memiliki hubungan dengan rezim Assad. Menjelang pemberontakan, masyarakat Suriah tetap sangat represif, dengan ketidaksetaraan yang semakin mencolok dalam kekayaan dan hak istimewa.³

Suriah secara sosial masyarakatnya juga memiliki permasalahan. Adanya ketegangan antara dua aliran Islam, yakni Sunni dan Syiah dimana mayoritas penduduk Suriah merupakan Islam Sunni, sedangkan rezim Suriah didominasi oleh sekte Syiah Alawi. Krisis lingkungan juga berperan dalam pemberontakan Suriah. Antara 2006 dan 2010, Suriah mengalami kekeringan terburuk dalam sejarah modern negara

² *ibid*

³ *ibid*

⁴ *ibid*

tersebut. Ratusan ribu keluarga petani menjadi miskin, menyebabkan migrasi massal penduduk pedesaan ke daerah perkotaan yang kumuh.⁴

Salah satu daerah pemukiman kumuh yang ada di Suriah adalah Dar'a, tepatnya di wilayah selatan Suriah. Daerah inilah yang menjadi tempat awal mula terjadinya konflik Suriah. Proses konflik Suriah bermula ketika pihak pemerintah menangkap sekelompok pelajar yang membuat graffiti yang menunjukkan adanya perlawanan terhadap rezim Assad. Sekelompok pelajar tersebut menerima perlakuan kekerasan dari pihak rezim. Sebagai akibatnya, 5 orang tewas ditembak serta salah satu diantaranya mati karena disiksa secara sadis.⁵

Kejadian tersebut menimbulkan reaksi di kalangan rakyat Suriah. Pada Maret 2011 terjadilah aksi protes yang menuntut pembebasan sekelompok pelajar yang ditangkap tersebut. Aksi protes yang dilakukan secara damai tersebut diikuti oleh kisaran puluhan ribu demonstran. Namun, pihak rezim merespon aksi protes tersebut dengan tindakan yang represif. Pihak rezim mengerahkan pasukan bersenjata, melakukan penangkapan massal terhadap demonstran dan juga menembaki para demonstran yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Sebagai hasilnya, 4 orang tewas ditembak oleh pihak bersenjata rezim Assad.⁶

Demonstrasi semakin meluas hingga dalam skala nasional. Demonstran menuntut agar Assad turun dari kekuasaannya. Kerusuhan akhirnya tidak dapat dihindari sebagai akibat dari

⁵ *ibid*

⁶ *ibid*

penggunaan kekerasan dan senjata oleh rezim Assad terhadap demonstran. Pihak oposisi mulai mengangkat senjata. Pada awalnya hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, dan kemudian untuk melawan pasukan rezim dari daerah masing-masing. Kekerasan yang terjadi antara pihak rezim dan oposisi kemudian bereskalasi menjadi perang sipil. Pada Juli 2011, pihak oposisi secara resmi membentuk brigade pasukan pemberontak untuk melawan pasukan rezim dan menguasai perkotaan, kota-kota kecil dan pedesaan. Hingga pada tahun 2012, berperangan meluas hingga kota Damaskus dan Aleppo.⁷

Secara garis besar, kekerasan sebagai bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh rezim Assad terhadap demonstran hanyalah sebagian dari pemicu meletusnya konflik Suriah. Namun jauh di balik itu, kurangnya kebebasan berpendapat dan berpolitik bagi rakyat Suriah dibawah rezim otoritarian Assad, tingginya angka pengangguran, korupsi dan krisis ekonomi merupakan akar dari konflik Suriah.

2. Posisi Arab Saudi dan Mesir dalam Konflik Suriah

Konflik Suriah pada awalnya adalah konflik domestik. Konflik domestik diartikan sebagai konflik yang terjadi di dalam suatu negara, antara pemerintah dengan anti pemerintah. Konflik Suriah menjadi lebih rumit dengan keterlibatan pihak-pihak asing. Pertempuran yang berkelanjutan antara pihak rezim dengan pihak oposisi semakin tidak menunjukkan hasil yang jelas, sehingga kedua belah pihak sama-sama memutuskan untuk meminta bantuan

kepada aliansi internasional. Dengan ikut sertanya pihak asing menjadikan Konflik Suriah bereskalasi menjadi *proxy war*. Arab Saudi dan Mesir merupakan bagian dari pihak-pihak asing yang terlibat di dalam Konflik Suriah.

Secara garis besar, negara-negara yang terlibat di dalam konflik Suriah dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pro rezim Assad, kelompok anti rezim Assad atau pro oposisi, dan kelompok yang bersikap netral atau tidak memihak kepada salah satu dari dua kelompok tersebut. Negara pendukung pihak oposisi merupakan negara yang membantu pasukan oposisi rezim Assad dalam berbagai bentuk bantuan dan mengupayakan agar jatuhnya rezim Assad di Suriah. Klasifikasi kelompok negara yang terlibat di dalam konflik Suriah berikutnya adalah negara netral. Negara netral merujuk kepada negara yang belum mengambil posisi tegas atau telah memisahkan kesetiaan. Klasifikasi terakhir kelompok negara yang terlibat dalam konflik Suriah adalah negara yang mendukung pihak rezim Assad.

Arab Saudi memegang peranan penting bagi pihak oposisi di konflik Suriah. Arab Saudi merupakan negara pendukung utama pihak oposisi di Suriah. Diantara peran penting tersebut seperti menyokong persenjataan dan pendanaan bagi faksi-faksi oposisi, contohnya *Free Syrian Army* (FSA). Sedangkan posisi Mesir, merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam kelompok negara yang mendukung rezim Assad di Suriah. Mesir secara resmi menyatakan keberpihakannya kepada rezim Assad pada November 2016 ketika presiden

⁷ *ibid*

Abdel Fatah Al-Sisi diwawancarai oleh salah satu saluran televisi Portugis. Al-Sisi mengatakan bahwa prioritas Mesir dalam menyikapi konflik Suriah adalah mendukung secara penuh pasukan rezim Assad di Suriah dan kedaulatannya⁸ Dukungan tersebut adalah untuk pertama kalinya Mesir, yang merupakan sekutu lama Amerika Serikat, menyatakan keberpihakannya secara terbuka terhadap pihak rezim Assad.

B. Kepentingan Arab Saudi dalam Konflik Suriah

1. Persaingan dominasi di kawasan Timur Tengah dengan Iran

Arab Saudi merupakan satu diantara sekian banyak negara yang mengambil tindakan tegas terhadap rezim Bashar Assad. Raja Abdullah, telah mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh rezim Assad terhadap demonstran pada tahun 2011, dan menjadikan ia sebagai pemimpin negara Arab senior pertama yang melakukan hal tersebut. Raja Abdullah juga menarik kedutaan besar Arab Saudi dari Suriah. Selain itu, Raja Abdullah juga merupakan pemimpin negara Arab pertama yang memanggil secara terbuka untuk mempersenjatai pihak oposisi rezim Assad⁹.

Tidak diragukan lagi bahwasanya Arab Saudi merupakan salah satu negara yang paling penting bagi pihak oposisi

rezim Assad di Suriah. Selain mengirimkan bantuan berupa persenjataan kepada pemberontak yang terafiliasi dengan haluan islamis, Arab Saudi juga mempersenjatai pasukan pihak oposisi penting lainnya seperti FSA. Bantuan militer yang dikirimkan kepada FSA berupa kendaraan lapis baja, senapan mesin dan juga alat-alat berat lainnya. Selain bantuan persenjataan, Arab Saudi juga memberikan suntikan dana kepada FSA berupa gaji yang dibayarkan kepada milisi FSA dalam nominal dollar ataupun euro. Gaji yang diberikan tersebut bahkan nominalnya melebihi gaji rata-rata yang diperoleh oleh pegawai pemerintahan rezim Assad. Bantuan dana tersebut dimaksudkan oleh Arab Saudi agar semakin banyak pihak yang ikut membelot dari rezim Assad untuk bergabung dengan pihak oposisi lainnya.¹⁰

Konflik Suriah yang meletus pada musim panas 2011 telah bereskalasi menjadi proxy war antara Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi dan Iran memang tidak pernah berhadapan langsung antara satu dengan lainnya, akan tetapi, keduanya saling mendukung pihak-pihak internal dalam Konflik Suriah. Arab Saudi yang secara bertahap telah meningkatkan dukungannya kepada pihak oposisi, di sisi lain, Iran juga secara konsisten menjadi sekutu paling setia rezim Assad dengan memberikan dukungan berupa persenjataan dan milisi.¹¹

⁸ Einat Wilf, 2017. *THE BATTLEGROUND THEATRES*, Australian Strategic Policy Institute, hal. 1-3

⁹ Alaa Al-Din Arafat, 2019, *Egyptian-Saudi Relations between Short-lived Honeymoon and Radical Strategic Shifts*, Journal of Global Peace and Conflict Vol. 7, hal. 21

¹⁰ Meir Litvak, 2017. *Saudi Arabia, the Gulf, and the New Regional Landscape*, Begin-Sadat for Strategic Studies, hal. 52-53

¹¹ René Rieger, *In Search of Stability: Saudi Arabia and the Arab Spring*, dalam Gulf Research Center 2014, hal. 16

Proxy war yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah direpresentasikan ke dalam persaingan untuk dominasi di kawasan tersebut. Sejarah dari persaingan antara kedua negara ini di Timur Tengah berakar dari pasca tumbangannya rezim Shah Mohammad Reza Pahlevi di Iran oleh revolusi yang dikenal sebagai revolusi islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini pada tahun 1979. Negara monarki tersebut ditumbangkan dengan revolusi dan menggantinya dengan negara islam . Alasan revolusi tersebut adalah Iran yang dipimpin oleh Shah Pahlevi dianggap sebagai representasi kolonialisme dan imperialisme barat serta nilai-nilai sekulerisme dalam pemerintahan yang dijalankan. Iran yang berada di bawah kekuasaan Shah Pahlevi tidak merepresentasikan nilai-nilai islam.

Oleh karena itu, revolusi tahun 1979 tersebut dapat dikatakan sebagai awal mula terjadinya perseteruan di antara kedua negara ini. Hal ini berkesesuaian dengan fakta, bahwasanya, sebelum revolusi 1979 tersebut terjadi, Arab Saudi dan Iran merupakan sekutu. Selama periode rezim Shah Pahlevi, hubungan Arab Saudi dan Iran tidak pernah mengalami ketegangan. Bahkan, hubungan keduanya meningkat pada tahun 1960-an, ketika Arab Saudi menghadapi kemunculan Pan-Arabisme yang digaungkan oleh presiden Mesir pada saat itu, Gamal Abdel Nasser. Kedua negara ini juga berkerjasama untuk mengantisipasi kemungkinan ikut sertanya Uni Soviet dalam pertikaian antara Arab Saudi dan Mesir di era Nasser tersebut. Arab Saudi dan Iran pada periode tersebut juga

bekerjasama dalam menghadapi ancaman yang sama yang berasal dari partai nasionalis-sekuler Irak, yakni partai Baath.

Pasca revolusi 1979, ketegangan dan persaingan antara Arab Saudi dan Iran pun dimulai. Iran sebelum revolusi 1979 yang merupakan negara monarki, ditumbangkan dan digantikan oleh sebuah negara yang berbentuk republik islam. Iran pasca revolusi dipimpin oleh pemimpin revolusi 1979 itu sendiri, Ayatollah Khomeini. Ia bukan hanya sebagai pemimpin, akan tetapi sebagai *supreme leader* atau pemimpin tertinggi.

Khomeini merupakan sosok yang berhaluan Syi'ah radikal, yang ia buktikan dengan mentransformasi Iran menjadi negara republik islam yang menggabungkan antara elemen teokrasi, republikan, dan juga demokrasi. Melalui revolusi 1979 yang berhasil ia jalankan tersebut, Khomeini menggunakan kepemimpinannya di Iran untuk menyebarkan propaganda revolusi ke seluruh kawasan Timur Tengah. Propaganda inilah yang menjadi awal mula ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Alasannya adalah, revolusi yang dipropagandakan oleh Khomeini tersebut mengancam segala bentuk pemerintahan monarki di kawasan, yang mana Arab Saudi adalah salah satu dari negara monarki tersebut. Arab Saudi khawatir terhadap ide revolusi islam tersebut yang bisa saja menyebabkan ketidakstabilan di dalam masyarakatnya, dan bahkan lebih buruk lagi akan mengancam kekuasaan monarki Arab Saudi.¹²

Proxy wars antara kedua negara ini bahkan memiliki pola yang sama dengan

¹² Gidon Windecker dan Peter Sendrowicz. *Cold War in the Gulf* dalam Demographic Change: A

Fateful Challenge (Konrad Adenauer Stiftung: 2016) hal. 83

Perang Dingin yang pernah terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam beberapa dekade yang lalu. Arab Saudi dan Iran memang tidak pernah berkonfrontasi secara langsung, akan tetapi kedua negara ini saling menggunakan unsur-unsur konflik militan dan penggunaan kekuatan militer yang dapat diidentifikasi sebagai usaha untuk saling memperkuat posisi di Timur Tengah. Arab Saudi dan Iran saling memanfaatkan konflik yang sedang terjadi di dalam negara lain seperti halnya perang saudara. Konflik tersebut dimanipulasi oleh Arab Saudi ataupun Iran untuk saling melemahkan kekuatan ataupun pengaruh di antara keduanya melalui pihak-pihak yang didukung oleh kedua negara ini. Selain sebagai proxy war, kedua negara ini tentu saja memanfaatkan konflik dalam negara lain tersebut sebagai instrumen dalam memperkuat posisi, pengaruh, dan juga prestise di kawasan Timur Tengah.¹³

2. Persaingan ideologi Sunni-Syi'ah dengan Iran

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwasanya persaingan Arab Saudi dengan Iran di Timur Tengah terhadap dominasi, hegemoni, dan pengaruh adalah sebuah fakta yang bisa dilihat secara jelas. Namun ada aspek penting lainnya yang harus dilihat dari persaingan yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah. Aspek ideologi dan sektarian merupakan aspek penting yang memotori persaingan kedua negara ini. Arab Saudi menganut mazhab Sunni sebagai aliran resmi negara, sedangkan di sisi lain Iran menganut mazhab Syi'ah sebagai aliran resmi negara. Konteks lebih besar yang bisa dilihat dari perbedaan sektarian di antara

Arab Saudi dan Iran adalah kedua negara ini saling melabeli sebagai representasi negara islam, bahkan lebih jauh persaingan untuk menjadi negara pemimpin dunia islam.

Sektarianisme antara Sunni dan Syi'ah memang telah menyebabkan perpecahan di Timur Tengah. Namun di dunia Arab modern seperti sekarang, sektarianisme Sunni dan Syi'ah di Timur Tengah dimotori oleh Arab Saudi dan Iran yang didorong oleh persaingan yang sangat modern dan sangat politis. Arab Saudi dan Iran melihat bahwa ada kepentingan persaingan antara satu dan lainnya melalui sektarianisme Sunni dan Syi'ah. Kebencian antara Arab Saudi dan Iran melalui sektarianisme bukan hanya didasari oleh isu agama semata, akan tetapi juga didasari adanya peluang untuk menggunakan isu sektarianisme sebagai alat untuk menjadikan perpecahan dua mazhab besar ini menjadi lebih kuat dan besar. Dan yang paling penting adalah perpecahan antara Sunni dan Syi'ah telah melebar dengan faktor politis sebagai alasan paling utama, serta manipulasi yang disengaja dari para pemimpin yang ada di Timur Tengah.

Konflik antara Arab Saudi dan Iran secara garis besar memang didasari oleh persaingan geopolitik di Timur Tengah, akan tetapi aspek sejarah dan sektarian agama juga menjadi dasar konflik antara keduanya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Revolusi Islam 1979 di Iran merupakan kunci dari awal persaingan dan konflik di Timur Tengah antara Arab Saudi dan Iran di dalam segala aspek, termasuk di dalamnya aspek sektarianisme. Nilai-nilai Revolusi Islam di Iran yang melahirkan Iran seperti saat

¹³ *ibid*

sekarang ini, yang pada dasarnya menekankan model politik yang dimiliki oleh mazhab Syi'ah, yakni negara teokrasi. Paham teokrasi ala Syi'ah meyakini bahwasanya kepemimpinan suatu negara itu harus dipegang oleh para ulama, dan inilah yang diperkenalkan oleh Ayatollah Khomeini pada saat itu sebagai *velayat e faqih*. Nilai-nilai revolusi tersebut tentu saja bertentangan dengan keyakinan mazhab Sunni, terlebih lagi bagi Arab Saudi sendiri yang menerapkan monarki absolut sebagai sistem kekuasaannya. Hal yang mendasar ini semakin memperkuat perselisihan dalam aspek agama dan sektarian di Timur Tengah¹⁴

Babak baru persaingan ideologi sektarian antara Sunni dan Syi'ah yang saling diwakili oleh Arab Saudi dan Iran dimulai pasca berlangsungnya Arab Spring yang menghasilkan Konflik Suriah itu sendiri. Konflik Suriah yang telah menjadi arena konflik bagi berbagai pihak, termasuk di dalamnya Arab Saudi dan Iran, mencoba untuk saling bersaing dalam memperkuat pengaruh ideologi sektarian masing-masing. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Suriah merupakan salah satu dari bagian negara-negara yang termasuk ke dalam prospek ide *Shiite crescent* nya Iran. Konflik Suriah secara nyata telah menjadi peluang baik bagi Arab Saudi maupun Iran untuk menyulut konflik sektarian.

Suriah dikuasai oleh rezim Assad, yang notabnya menganut paham Syi'ah. Assad beserta elit politik Suriah

merupakan penganut Syi'ah yang merupakan minoritas di negara tersebut. Sedangkan mayoritas penduduk Suriah (termasuk di dalamnya pihak oposisi) merupakan penganut Sunni. Dukungan Arab Saudi terhadap pihak oposisi rezim Assad memiliki tujuan untuk menumbangkan rezim Assad itu sendiri. Tumbangnya rezim Assad merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Arab Saudi dalam rangka menghilangkan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Tumbangnya rezim Assad akan memutus sarana penghubung bagi Iran dengan sekutu Syi'ah lainnya, yakni Hezbollah. Arab Saudi berusaha agar cita-cita *Shiite crescent* nya Iran tidak akan pernah terwujud¹⁵

Motif sektarian sangat mempengaruhi kebijakan Arab Saudi dalam Konflik Suriah. Hal ini bisa dilihat dari langkah Arab Saudi yang mendukung fraksi oposisi yang termasuk kedalam fraksi Sunni-Wahabi. Salah satu contoh fraksi tersebut adalah *Jaish Al-Islam*, yang menerima bantuan finansial berupa suntikan dana sebesar 100 juta dollar. Fraksi *Jaish Al-Islam* terdiri dari 50 kelompok pemberontak yang sebagian besarnya terafiliasi kepada Sunni-Wahabi. Sebagai pemimpin fraksi ini, Arab Saudi menunjuk Zahran Alloush yang merupakan anak dari ulama Arab Saudi, yang merupakan pemimpin kelompok *Liwa Al-Islam*¹⁶

Selain membentuk *Jaish Al-Islam*, Arab Saudi juga membentuk *Jaish Al-Fatah*, yang juga merupakan gabungan

¹⁴ Helia Ighani, 2016. *Managing the Saudi-Iran Rivalry*, Council on Foreign Relations, hal. 2

¹⁵ Shahram Akbarzadeh, *Routledge Handbook of Political Islam*, (New York: Routledge, 2017) hal. 91

¹⁶ Yehuda U. Blanga, 2017. *Saudi Arabia's Motives in the Syrian Civil War*, Middle East Policy, Vol. 24 No. 4, hal. 53

dari fraksi-fraksi pemberontak Sunni di Suriah. Arab Saudi juga mendukung *Ahrar Al- Syam* yang juga merupakan gabungan dari pemberontak islamis dan Sunni-Wahabi, dan juga bahkan menambah dukungan terhadap *Jabhat Al-Nusra* yang merupakan bekas fraksi *Al- Qaeda*. Jika dilihat dari fraksi-fraksi yang didukung oleh Arab Saudi, semuanya memiliki kesamaan, yakni sama-sama terafiliasi ideologi Sunni-Wahabi yang dikampanyekan oleh Arab Saudi¹⁷

Dalam menjalankan kepentingannya, Arab Saudi melalui fraksi-fraksi yang didukung bekerjasama dengan negara Sunni lainnya untuk melancarkan operasi militer yang dinamai dengan *Amaliyyat Asifat al-Hazm* pada 26 Maret 2015 terhadap milisi Syi'ah yang didukung oleh Iran. Tujuan utama Arab Saudi sangat jelas, yakni tumbangnya rezim Assad sehingga bisa melemahkan pengaruh Iran. Jika pengaruh Iran hilang di Suriah, maka hal tersebut bisa diartikan sebagai kemenangan bagi pihak Sunni dalam menangkal ekspansi ideologi Syi'ah yang berusaha dilakukan oleh Iran. Arab Saudi sangat berambisi untuk menjadi negara Sunni yang akan memimpin dunia islam secara umum. Apa yang telah dilakukan oleh rezim Assad yang notabeneanya merupakan minoritas Syi'ah Alawi telah mempersekusi dan membantai saudara mayoritas Sunni bagi Arab Saudi di Suriah. Arab Saudi melihat faktor sektarianisme juga merupakan motif yang bisa dibawa oleh Arab Saudi untuk menumbangkan rezim Assad di Suriah.

¹⁷ Akbarzadeh, *loc.cit.*, hal. 28

¹⁸ Hassan Hassan, 13 Juni 2013. Syria: the view from the Gulf states, ECFR, tersedia di

Arab Saudi memiliki kepentingan untuk menggantikan rezim Assad dengan rezim yang terafiliasi dengan ideologi Sunni, sehingga akan menjadikan rezim tersebut condong kepada pihak Arab Saudi, sehingga akan semakin memperkuat posisi Arab Saudi di Timur Tengah. Itulah sebabnya mengapa Arab Saudi juga bersedia untuk mendukung fraksi pemberontak seperti *Ahrar Al-Syam*, jika hal tersebut akan menjamin tumbangnya rezim Assad. Dengan dukungan berkelanjutan yang diberikan oleh Arab Saudi terhadap fraksi pemberontak tersebut, akan memperkuat kekuatan Sunni di Suriah sehingga menyebabkan melemahnya kekuatan rezim Syi'ah Assad. Dengan melemahnya rezim Assad akan melemahkan pengaruh Iran beserta ide *Shiite crescent* nya di Timur Tengah. Melemahnya rezim Assad bukan hanya berpengaruh terhadap Suriah itu sendiri, namun juga akan mempengaruhi kekuatan Hezbollah yang juga merupakan proxy Syi'ah nya Iran di kawasan Timur Tengah.¹⁸

C. Respon negatif Arab Saudi terhadap perbedaan kebijakan politik dalam Konflik Suriah.

1. Protes Arab Saudi melalui kedutaan besar

Pada Oktober 2016, Dewan Keamanan PBB melaksanakan sidang yang membahas tentang bagaimana cara lebih lanjut untuk menyikapi perkembangan dalam Konflik Suriah. Sidang Dewan Keamanan PBB ini menjadi momentum terjadinya ketegangan hubungan antara Arab Saudi dengan Mesir

https://ecfr.eu/article/commentary_syria_the_view_from_the_gulf_states135/ diakses pada 2 Juli 2021

yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah Al-Sisi. Sidang dalam kesempatan tersebut dilaksanakan sebagai respon terhadap semakin memanasnya situasi dalam Konflik Suriah, salah satunya adalah pegeboman yang baru saja terjadi di kota Aleppo, Suriah.

Ketegangan bermula ketika Dewan Keamanan PBB menerima dua draf resolusi untuk Konflik Suriah. Dua draf resolusi tersebut masing-masing diusulkan oleh Spanyol-Prancis dan juga diusulkan oleh Russia. Ketika sesi voting dimulai, Mesir menjadi salah satu dari beberapa negara yang ikut memilih (negara lainnya adalah Tiongkok, Venezuela, dan Russia itu sendiri) untuk melakukan voting terhadap usulan resolusi Konflik Suriah yang diusulkan oleh Russia. Sedangkan usulan resolusi Konflik Suriah yang diusulkan oleh Spanyol-Prancis divoting oleh beberapa negara lainnya termasuk di dalamnya Arab Saudi. Ada perbedaan mendasar dari dua usulan draf resolusi ini.

Draf usulan resolusi Spanyol-Prancis menuntut agar semua aktivitas pemboman udara dan juga aktivitas penerbangan militer di atas wilayah kota Aleppo segera dihentikan. Selain itu, Spanyol-Prancis juga menuntut agar dihentikannya segala bentuk permusuhan dan memberikan akses kemanusiaan dengan segera, aman, dan juga tanpa hambatan di seluruh wilayah Suriah. Lebih lanjut Spanyol-Prancis juga menuntut agar pihak-pihak yang berkonflik -khususnya rezim Assad di Suriah- untuk menerapkan

hasil resolusi sidang Dewan Keamanan PBB sebelumnya. Di sisi lain usulan draf resolusi yang diusulkan oleh Russia berisi tuntutan untuk menghentikan segala bentuk permusuhan -khususnya di Aleppo- dengan segera. Russia juga menuntut agar semua pihak menghentikan segala bentuk dukungan baik secara finansial ataupun militer terhadap kelompok-kelompok oposisi seperti *Jabhat Al-Nusra* ataupun terhadap kelompok-kelompok yang terafiliasi kepada *Al-Qaeda* dan juga ISIS.

Merespon Mesir yang melakukan voting terhadap draf usulan Russia, Arab Saudi dengan tegas menolak usulan tersebut dan juga mengkritisi langkah yang dilakukan oleh Mesir tersebut. Arab Saudi melalui duta besarnya untuk PBB, Abdullah Al-Maliki, melakukan protes terhadap Mesir dan bahkan menggambarkan sikap Mesir tersebut sebagai perbuatan yang “menyakitkan”. Hal tersebut juga tidak berkesesuaian dengan “konsensus negara-negara Arab untuk Suriah”. Protes dan kritik yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap dukungan Mesir tersebut juga disampaikan oleh kepala lobi Arab Saudi untuk Amerika Serikat, Salman Ansari. Melalui *twitter* nya, Ansari mengkritik langkah Mesir tersebut dan menunjukkan keraguannya terhadap Mesir sebagai “Ibu” bagi orang-orang Arab dan dunia. Faktanya, julukan tersebut merupakan julukan yang diberikan oleh orang-orang Arab dan masyarakat Mesir itu sendiri¹⁹²⁰

¹⁹ Al-Masry Al-Youm, 10 Oktober 2016. *Saudi Arabia, Qatar slam Egypt for supporting Russia's proposal for Syria truce*, Egypt Independent, tersedia di <https://egyptindependent.com/saudi-arabia-qatar-slam-egypt-supporting-russia-s-proposal-syria-truce/> diakses pada 3 Juli 2021

²⁰ Al-Masry Al-Youm, 12 Oktober 2016. *Saudi ambassador recalled to Riyadh amid spat over Syria ceasefire vote*, Egypt Independent, tersedia di <https://egyptindependent.com/saudi-ambassador-recalled-riyadh-amid-spat-over-syria-ceasefire-vote/> diakses pada 3 Juli 2021

Meskipun Mesir tidak secara langsung menyatakan dukungannya atau keberpihakannya terhadap rezim Assad, akan tetapi, bagi Arab Saudi, apapun yang akan memberikan keuntungan bagi rezim Assad dalam Konflik Suriah sama saja artinya dengan menentang Arab Saudi. Dalam pandangan Arab Saudi, Mesir hendaknya mengikuti atau mendukung apapun langkah dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Arab Saudi dalam Konflik Suriah. mengingat begitu besarnya peran dan dukungan Arab Saudi terhadap rezim Al-Sisi, maka hal tersebut menjadi sebab yang jelas bagi Arab Saudi untuk melakukan protes melalui duta besarnya dalam sidang Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk respon negatif kepada dukungan Mesir terhadap apa saja yang akan menghalangi kepentingan Arab Saudi dalam Konflik Suriah²¹

2. Penghentian bantuan pengiriman minyak bumi

Menyusul semakin memanasnya hubungan antara Arab Saudi dan Mesir yang disebabkan oleh perbedaan kebijakan politik dalam Konflik Suriah, menyebabkan Arab Saudi yang merasa telah “dikhianati” oleh Mesir, melakukan kebijakan tambahan untuk menekan Mesir agar tetap “patuh” dan mendukung penuh segala kebijakan Arab Saudi dalam menyikapi isu Konflik Suriah.

Setelah melakukan protes keras melalui kedutaan besar dalam sidang Dewan Keamanan PBB, respon negatif Arab Saudi terhadap langkah yang dilakukan oleh Mesir tidak cukup sampai

di situ saja. Seminggu kemudian pasca protes tersebut, Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan pengiriman minyak bumi kepada the *Egyptian General Petroleum Corporation* (EGPC) yang merupakan perusahaan minyak utama negara Mesir. Hal ini dibenarkan oleh pejabat pemerintahan Mesir. Sebagai tambahan, kebijakan Saudi Aramco dalam menghentikan pengiriman minyak bumi ini dilakukan dalam waktu yang tidak ditentukan, dalam kata lain, kebijakan ini dapat diartikan sebagai sanksi dari Arab Saudi kepada Mesir yang telah melakukan voting terhadap draf usulan resolusi Russia tersebut.

Arab Saudi sempat menolak untuk membenarkan tentang pemberhentian pengiriman minyak bumi tersebut berkaitan dengan ketegangan yang terjadi pada sidang Dewan Keamanan PBB, dan juga mengatakan bahwasanya pemberhentian pengiriman minyak bumi tersebut hanya untuk sementara. Namun, pada 23 Oktober 2016, Kementerian Perminyakan Mesir justru mengatakan bahwa *Saudi Aramco* belum memberi tahu secara resmi tentang pengiriman kembali minyak bumi kepada Mesir untuk bulan November. Dan juga beberapa sebelumnya, Mesir melalui Menteri Luar Negerinya, Sameh Shoukry juga tidak membenarkan adanya pertikaian antara Arab Saudi dan Mesir, dan sebaliknya ia justru mengatakan bahwa kerjasama antara kedua negara tersebut tetap berjalan dengan baik²²

Ada atau tidaknya keterkaitan antara voting Mesir dalam sidang Dewan

²¹ Arafat, *op.cit.*, hal 22

²² 22 Oktober 2016. 'No conflict with Saudi over UN vote on Syria': Egypt FM, Ahram Online, tersedia di

<https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/246360/Egypt/Politics-/No-conflict-with-Saudi-over-UN-vote-on-Syria-Egypt.aspx> diakses pada 6 Juli 2021

Keamanan PBB terhadap keputusan *Saudi Aramco* menghentikan pengiriman minyak bumi kepada Mesir, namun tetap jelas, bahwasanya ada ketegangan dalam hubungan antara Arab Saudi dan Mesir. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwasanya sebelum ketegangan dalam sidang Dewan Keamanan PBB itu terjadi, Arab Saudi dan Mesir telah terlebih dahulu melakukan kesepakatan pengiriman minyak bumi dan juga bahan bakar. Pada bulan April 2016, Arab Saudi telah menyetujui untuk menyuplai kebutuhan minyak bumi Mesir dengan jumlah 700 ribu ton perbulan dalam jangka waktu lima tahun kedepan²³

Selain itu, indikasi lainnya yang bisa menunjukkan bahwasanya pemberhentian pengiriman minyak bumi tersebut memang berkaitan dengan voting Mesir dalam sidang Dewan Keamanan PBB tersebut adalah kesadaran Arab Saudi akan ketergantungan Mesir terhadap pasokan minyak bumi. Faktanya, pasca Al-Sisi berhasil berkuasa di Mesir, target utama yang ingin dicapai oleh Al-Sisi adalah membangun sistem ekonomi berbasis pertumbuhan inklusif yang mampu menghasilkan lapangan pekerjaan yang cukup dan berkualitas, sehingga akan mampu menyerap 600 ribu pendatang baru ke pasar tenaga kerja Mesir setiap tahunnya²⁴ Pertumbuhan inklusif ini tentu tidak bisa dicapai tanpa membahas posisi ekonomi Mesir dalam pembagian kerja

global, dalam kata lain, apa yang dihasilkan oleh Mesir untuk melakukan pertukaran dengan seluruh dunia²⁵

Posisi ekonomi internasional Mesir yang dimaksud adalah fakta bahwasanya Mesir yang telah ketergantungan terhadap hidrokarbon, khususnya minyak bumi dan gas alam selama empat dekade terakhir. Meskipun besaran sektor hidrokarbon tidak terlalu dominan dalam *Gross Domestic Product* atau (GDP) Mesir, sebagai penggerak utama daya saing global Mesir, sektor hidrokarbon merupakan sektor utama bagi Mesir untuk memperoleh sumber devisa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lebih lanjut, Mesir juga merupakan negara eksportir minyak bersih sepanjang sejarah negara tersebut. Oleh karenanya, Mesir bisa meraih keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia, khususnya ketika terjadinya kejutan minyak pada tahun 1973 dan 1979. Namun situasi berubah ketika Mesir menjadi lebih konsumtif terhadap produk hasil olahan minyak bumi dan menurunnya produksi minyak bersih Mesir pada tahun 2006. Oleh sebab itu, sejak tahun 2012, Mesir berubah menjadi negara importir minyak bumi dan gas alam.

Berdasarkan statistik, perbandingan antara jumlah produksi dan konsumsi minyak bumi Mesir tidak seimbang, dengan kecenderungan

²³ 11 April 2016. *Saudi Arabia to supply Egypt with 700,000 tonnes of petroleum products a month*, Reuters, tersedia di <https://www.reuters.com/article/uk-egypt-saudi-oil-idUKKCN0X815C?edition-redirect=uk> diakses pada 6 Juli 2021

²⁴ Ghada Barsoum, Mohamed Ramadan, dan Mona Mustafa. *Labour market transitions of young women and men in Egypt*, dalam

Work4Youth Publication Series No. 16 tahun 2014

²⁵ Amr Adly, 2 Agustus 2016. *Egypt's Oil Dependency and Political Discontent*, Carnegie Middle East Center, tersedia dalam <https://carnegie-mec.org/2016/08/02/egypt-s-oil-dependency-and-political-discontent-pub-64224> diakses pada 6 Juli 2021

konsumtif. Untuk perharinya, Mesir hanya mampu menghasilkan sekitar 682 ribu barrel perhari, sedangkan untuk perharinya, Mesir menghabiskan sekitar 877 ribu barrel perhari, sehingga dapat disimpulkan Mesir mengalami defisit sekitar 194 ribu barrel perhari. Oleh karena itu, dengan melihat bagaimana ketergantungan Mesir terhadap minyak bumi yang begitu besar, dapat dipahami bahwasanya Arab Saudi ingin memberikan sanksi kepada Mesir atas veto yang dilakukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB tersebut.²⁶

Arab Saudi sadar akan kondisi Mesir yang sedang mengalami krisis kekurangan pasokan devisa yang parah, yang ditaksir hingga lebih dari US\$ 19 juta, hal ini berbanding terbalik dengan periode sebelum jatuhnya rezim Husni Mubarak pada tahun 2011, dimana Mesir justru memiliki cadangan devisa yang ditaksir mencapai US\$ 37 juta. Meskipun Mesir merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar ke-26 di dunia pada tahun 2014, namun tidak menutup fakta bahwa Mesir tetap mengimpor minyak bersih senilai US\$ 4 juta pada tahun itu. Dalam tahun yang sama, Mesir mengimpor 6% produk minyak bersih dari Arab Saudi. Lebih lanjut, bantuan minyak bumi dari Arab Saudi tersebut faktanya telah berhasil membantu Mesir untuk menyelamatkan ratusan juta dolar perbulannya saat menghadapi kekurangan mata uang.²⁷

Penghentian pengiriman minyak bumi oleh Arab Saudi memiliki dampak terhadap Mesir. Sesaat setelah diumumkannya penghentian pengiriman minyak bumi tersebut, Mesir terpaksa untuk memaksa pembeli produk minyak negara tersebut untuk segera meningkatkan tender bahkan dalam kondisi Mesir yang tengah kekurangan dolar yang parah dan memiliki tunggakan yang meningkat terhadap negara produsen minyak lainnya. Selain itu, EGPC juga harus memasuki pasar kembali dalam beberapa pekan terakhir untuk mengisi kesenjangan yang diakibatkan oleh berhentinya pasokan minyak dari Arab Saudi. EGPC juga mengumumkan tender pembelian terbesarnya dalam beberapa bulan, termasuk permintaan sekitar 560 ribu ton minyak bumi yang seharusnya berasal dari pasokan Arab Saudi yang direncanakan akan diterima pada bulan Oktober. Selain itu Mesir juga terpaksa harus meningkatkan pencarian untuk pasokan minyak bumi sekitar 200 ribu ton dari total pasokan untuk bulan September. Lebih lanjut, bahkan Mesir diperkirakan akan mendevaluasi atau mengambangkan mata uangnya dalam beberapa hari mendatang.²⁸

Mesir selama ini selalu mengandalkan bantuan pasokan minyak bumi dari Arab Saudi untuk membantu menopang cadangan devisa negara tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh gubernur bank sentral, bahwasanya perlu mencapai US\$ 25 juta dari total akhir pada September sebesar US\$ 19,6 juta bagi

²⁶ *Egypt Oil*, Worldometer, tersedia di <https://www.worldometers.info/oil/egypt-oil/> diakses pada 6 Juli 2021

²⁷ *Total energy production 2014*, Energy Information Administration, tersedia di <https://www.eia.gov/international/rankings/worl>

d?pa=12&u=0&f=A&v=none&y=01%2F01%2F2018 diakses pada 6 Juli 2021

²⁸ 7 Oktober 2016. *Without Saudi oil aid, Egypt rushes out big buy tenders*, Reuters, tersedia di <https://www.reuters.com/article/egypt-saudi-energy-idUSL3N1CC2IY> diakses pada 6 Juli 2021

Mesir agar bisa mengembangkan mata uangnya. Berbagai kondisi inilah yang menjadikan Arab Saudi menggunakan penghentian pengiriman minyak bumi kepada Mesir sebagai sanksi atas tindakan Mesir yang tidak sejalan dengan kepentingan Arab Saudi dalam menyikapi Konflik Suriah. Arab Saudi menganggap bahwasanya ketergantungan Mesir terhadap bantuan pasokan minyak bumi merupakan senjata yang bisa digunakan untuk mengancam Mesir agar kembali mengikuti segala kebijakan Arab Saudi dalam menyikapi Konflik Suriah. Pembatalan pengiriman bantuan minyak bumi kepada Mesir merupakan peringatan oleh Arab Saudi terhadap Al-Sisi, dan juga untuk menekan Al-Sisi agar sejalan dengan kebijakan-kebijakan Arab Saudi dalam isu kunci Konflik Suriah²⁹

Daftar Pustaka

- Adly, Amr. 2016. *Egypt's Oil Dependency and Political Discontent*. <https://carnegie-mec.org/2016/08/02/egypt-s-oil-dependency-and-political-discontent-pub-64224>. (06/07/2021)
- Ahram Online. 2016. *'No conflict with Saudi over UN vote on Syria': Egypt FM*. <https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/246360/Egypt/Politics-/No-conflict-with-Saudi-over-UN-vote-on-Syria-Egypt.aspx>. (06/07/2021)
- Akbarzadeh, Shahram. 2017. *Routledge Handbook of Political Islam*. New York: Routledge
- Al-Youm, *Al-Masry*. 2016. *Saudi ambassador recalled to Riyadh amid spat over Syria ceasefire vote*. <https://egyptindependent.com/saudi-ambassador-recalled-riyadh-amid-spat-over-syria-ceasefire-vote/>. (03/07/2021)
- Arafat, Alaa Al-Din. 2019. "Egyptian-Saudi Relations between Short-Lived Honeymoon and Radical Strategic Shifts." *Jurnal Global Peace and Conflict*, Juni 2019, 7 (1), hal. 14-35.
- Barsoum, Ghada, Ramadan, Mohamed, dan Mustafa, Mona. 2014. *Labour Market Transitions of Young Women and Men in Egypt*. Jenewa: International Labour Office.
- Blanga, Yehuda U. 2017. "Saudi Arabia's Motives in the Syrian Civil War." *Jurnal Middle East Policy*, 24 (4), hal. 53-75.
- Ghitis, Fida. 2016. *Will Syria Differences Sink Saudi Arabia and Egypt's Marriage of Convenience?*. <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/20170/will-syria-differences-sink-saudi-arabia-and-egypt-s-marriage-of-convenience>. (07/07/2021)

²⁹ Fida Ghitis, 13 Oktober 2016. *Will Syria Differences Sink Saudi Arabia and Egypt's Marriage of Convenience?*, World Politik Review, tersedia di

<https://www.worldpoliticsreview.com/articles/20170/will-syria-differences-sink-saudi-arabia-and-egypt-s-marriage-of-convenience> diakses pada 7 Juli 2021

- Hassan, Hassan. 2013. Syria: the view from the Gulf states. https://ecfr.eu/article/commentary_syria_the_view_from_the_gulf_states135/. (02/07/2021)
- Ighani, Helia. 2016. Managing the Saudi-Iran Rivalry. <http://www.jstor.com/stable/resrep05680>. (30/06/2021)
- Khan, Hafeez Ullah dan Khan, Wassem. 2017. "Syria: History The Civil War and Peace Prospects." *Jurnal Political Studies*, 24 (2), hal. 570-591.
- Litvak, Meir. 2017. Iran and Saudi Arabia: Religious and Strategic Rivalry. *Ramat Gan: The Begin-Sadat Center for Strategic Studies*.
- Rieger, Rene. 2014. In Search of Stability: Saudi Arabia and the Arab Spring. Cambridge: Gulf Research Center.
- Routers Staff. 2016. *Saudi Arabia to supply Egypt with 700,000 tonnes of petroleum products a month*. <https://www.reuters.com/article/uk-egypt-saudi-oil-idUKKCN0X815C?edition-redirect=uk>. (06/07/2021)
- Routers Staff. 2016. *Saudi Aramco informed Egypt about suspending oil product supply: official*. <https://www.reuters.com/article/us-egypt-saudi-petroleum-idUSKCN12A1DH>. (06/07/2021)
- Routers Staff. 2016. *Without Saudi oil aid, Egypt rushes out big buy tenders*. <https://www.reuters.com/article/egypt-saudi-energy-idUSL3N1CC2IY>. (06/07/2021)
- Wilf, Einat. 2017. THE BATTLEGROUND THEATRES. *Australian Strategic Policy Institute*
- Windecker, Gidon dan Sendrowicz, Peter. 2016. Cold War in the Gulf. Sank Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Worldometer. 2016. Egypt Oil. <https://www.worldometers.info/oil/egypt-oil/>. (06/07/2021)